

Relevansi Negara Oseania dalam Diplomasi Iklim di PBB

Muhammad Sulthon Rifqi Alfarizi¹, Hardhana Dinaring Danastri², Putri Dewi Cesilia Maulidina³, Fajar Junadhi⁴, Lady Meiske Shakila⁵, Tasya Adinda Aulia⁶

Universitas Pertamina^{1,2,3,4,5,6}
muhammadsulthonrifqialfarizi@gmail.com¹

Abstract

Oceania is a region that stretches from Papua New Guinea to New Zealand and consists of 34 Island countries. These countries are also commonly referred to as the Pacific countries. Acknowledging the urgency to respond to the climate impacts, Oceanian countries carry out climate diplomacy in various negotiating forums, especially at the United Nations. In recent decades, Oceanian countries have actively advocated themselves as one of the groups most vulnerable to climate impacts, given their geographical location. Climate diplomacy is very important for Oceanian countries to spread ideas that can influence the international climate regime. Oceanian countries have a unique role in the practice of diplomacy at the United Nations, particularly United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in this context. Therefore, this paper seeks to explain the relevance of Oceania in climate diplomacy at the United Nations. In this study, the author uses a qualitative method that focuses on research design in the form of explanation. The author uses secondary data types to be a source of data in this research that comes from various journals, books, and other internet sources. This study finds that Oceanian climate diplomacy is generally aimed at: 1) proliferating concrete climate actions by countries under the UNFCCC framework; 2) promoting a more inclusive approach within UNFCCC as the international climate regime; 3) legitimating the use of indigenous knowledge within climate actions under UNFCCC framework

Keywords: Climate Diplomatic; Oceania; UN; UNFCCC; Climate Policy

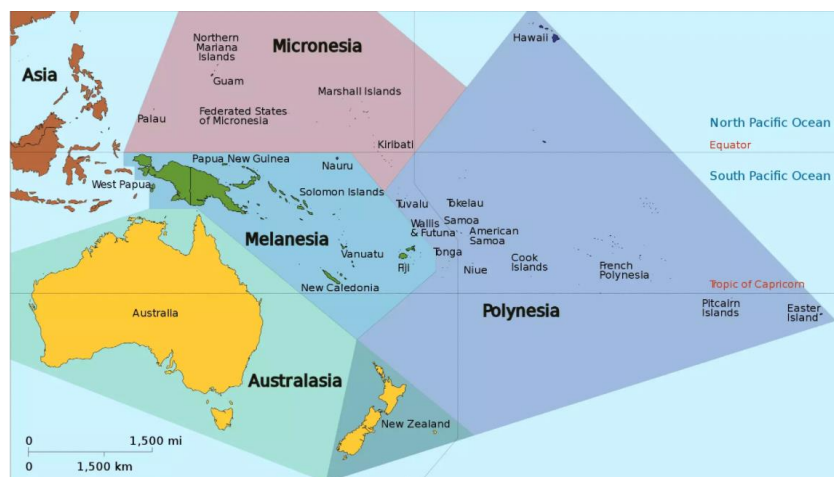
Abstrak

Oseania merupakan salah satu kawasan yang terbentang dari Papua Nugini hingga Selandia Baru dan terdiri atas 34 negara kepulauan. Negara-negara ini juga biasa disebut dengan negara pasifik. Seiring meningkatnya urgensi untuk merespons dampak iklim, negara-negara Oseania melakukan diplomasi iklim dalam berbagai forum negosiasi, terutama di PBB. Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara Oseania secara aktif menyuarakan posisinya sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak iklim mengingat letak geografisnya. Diplomasi iklim sangat penting bagi negara-negara Oseania untuk menyebarkan ide yang dapat mempengaruhi kebijakan iklim. Negara-negara Oseania memiliki peran yang unik dalam praktik diplomasinya di PBB, dalam konteks secara khusus adalah UNFCCC. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi negara Oseania dalam diplomasi iklim di PBB. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada desain penelitian berupa eksplanasi. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk menjadi sumber data dalam penelitian kali ini yang berasal dari berbagai jurnal, buku, dan sumber internet lainnya. Tulisan ini menemukan bahwa diplomasi iklim oleh negara-negara Oseania secara umum bertujuan untuk: 1) memperbanyak aksi iklim konkret oleh negara-negara di bawah kerangka UNFCCC; 2) mempromosikan pendekatan yang lebih inklusif dalam UNFCCC sebagai rezim iklim internasional; 3) melegitimasi penggunaan pengetahuan adat dalam aksi iklim di bawah kerangka kerja UNFCCC.

Kata Kunci: Diplomasi Iklim; Oseania; PBB; UNFCCC; Kebijakan Iklim

PENDAHULUAN

Kawasan Oseania atau Kepulauan Pasifik merupakan kelompok negara kepulauan dan wilayah teritorial yang terletak di wilayah samudra pasifik dan sekitarnya. Terbentang dari Papua Nugini hingga Pulau Paskah serta membujur dari Hawaii hingga Selandia Baru (Chandra, n.d.). Oseania memiliki 24 negara serta wilayah kepulauan (IUCN, nd). Dalam Wardhani (2015), terdapat tiga gugus pulau Oseania memiliki karakteristik masing-masing: Pertama, gugus Melanesia (masyarakat berkulit hitam). Berbagai negara dan wilayah teritorial yang terdapat di Melanesia, yaitu Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, New Caledonia, Papua Nugini, dan pulau kecil lainnya. Kedua, gugus Mikronesia (pulau kecil) memiliki negara dan wilayah teritorial, yaitu Guam, Republik Palau, Kepulauan Caroline, Kepulauan Mariana, Kepulauan Marshall, Kiribati, dan Nauru. Ketiga, gugus Polinesia (banyak pulau) memiliki negara dan wilayah teritorial, yaitu American Samoa, Easter Island, Hawaii, French Polynesia, Cook Islands, Niue, Pitcairn, Samoa, Tonga, Tokelau, Wallis dan Futuna, Tuvalu, dan Selandia Baru.

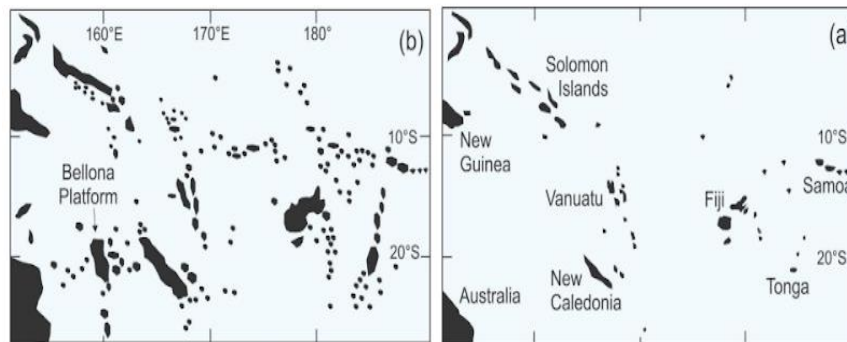


Gambar 1. Peta Oseania

Sumber: Eugenia Olivia, 2021

Perubahan iklim menurut United Nations (n.d.) mengacu pada pola cuaca dan suhu dalam jangka panjang. Perubahan ini dapat terjadi secara alamiah, seperti melalui variasi dari siklus matahari. Sejak 1800-an, perubahan aktivitas manusia serta revolusi industri menjadi pendorong utama bagi perubahan iklim yang terjadi di dunia (UN, nd). Perubahan iklim mengakibatkan kenaikan suhu bumi sekitar 1,1 derajat celcius (UN, nd). Kenaikan suhu melahirkan berbagai konsekuensi, salah satunya adalah perubahan Iklim, yang juga berkaitan dengan peningkatan air laut. Permukaan air laut sendiri telah meningkat sebanyak 8 hingga 9 inci sejak tahun 1880 (UN, nd). Kenaikan permukaan air laut meningkat sebesar dua kali lipat dari 0,06 inci (1,4 mm) per tahun, menjadi 0,14 inci (3,6 mm) per tahun sejak 2006 hingga 2015. Pada tahun 2020, mencapai rekor tinggi kenaikan air laut Sejak 1993, yakni sebesar (91,3mm) 3,6 inci (Lindsey, 2021). Hal tersebut berdampak pada pengurangan intensitas daratan (Oppenheimer et al., n.d.). Masalah tersebut sangat vital bagi Oseania, sebagai sekumpulan kepulauan kecil di sekitar

samudera pasifik. Berdasarkan Nace (2017), terdapat sekitar 8 pulau di Samudera Pasifik yang tenggelam akibat kenaikan air laut.



Gambar 2 Perbandingan beberapa kawasan Oseania 4000 tahun yang lalu (b) dan sekarang (a)

Sumber: Nunn, 2012

Implikasi perubahan iklim yang signifikan memotivasi Oseania melakukan langkah mitigasi dan penyelesaian permasalahan tersebut. Upaya intra dan ekstra (eksternal) telah dilakukan oleh Oseania. Oseania melakukan kerjasama internal dengan membentuk organisasi dan kerangka kerja bersama. Berbagai organisasi iklim yang dibuat oleh Oseania adalah The Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) dan the South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC) (Nunn, 2012; Bhide, 2020). Selain itu, PIF (Pacific Island Forums) juga menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu agenda kegiatan (Bhide et al., 2020). Kehadiran organisasi intra kawasan membuktikan terbentuknya kesadaran dan perjuangan bersama akan sektor iklim.

Ketidakpuasan Oseania dalam menangani permasalahan iklim secara regional, membuat mereka menysar forum global sebagai langkah alternatif. Isu iklim yang dibawa Oseania dalam lingkup global mendapat beberapa respon dari berbagai aktor. Dalam level negara, respon tersebut dapat terlihat dengan memberi bantuan dana kepada negara-negara Oseania. Menurut Lowy Institute (2019), Oseania menerima bantuan sebesar US\$3,88 Miliar pada 2019, dengan Australia sebagai penyumbang utama. Oseania menggunakan sebagian dana bantuan untuk menghadapi permasalahan perubahan iklim (UNDP, 2012). Tidak hanya bergantung pada bantuan internasional, Oseania juga memanfaatkan forum-forum internasional untuk menguatkan isu iklim tersebut.

Oseania memanfaatkan PBB sebagai forum global untuk menguatkan isu iklim mereka. PBB telah memainkan peran penting dalam menaruh Isu perubahan iklim sebagai salah satu agendanya (UN, n.d.). PBB menjadi wadah yang tepat untuk memfasilitasi diskusi, mencapai pemahaman dan kesepakatan, mengatur agenda, dan menampung aspirasi negara kecil dan cenderung memiliki pengaruh yang lemah (Viotti & Kauppi, 2012). Berbagai upaya dan kerjasama telah dijalin antara PBB dan negara lain untuk menyikapi perubahan iklim. Dimulai dari keberhasilan PBB dalam menengahi kesepakatan dekarbonisasi (UN, n.d.), meluncurkan agenda *Sustainable Development Goals*, penargetan pengurangan emisi karbon melalui Paris Agreement, mempromosikan green economy, hingga membuat kesepakatan dalam UNFCCC terkait pengurangan emisi karbon global, dan bantuan kepada negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim

(UN, n.d.). UNFCCC menjadi menjadi salah satu agenda PBB yang berfokus mengatasi isu-isu iklim global, hal ini sejalan dengan kutipan dalam publikasi UNFCCC:

“The UNFCCC provides the basis for concerted international action to mitigate climate change and to adapt to its impacts. Its provisions are far-sighted, innovative, and firmly embedded in the concept of sustainable development.”
(UNFCCC, 2006).

Dengan memanfaatkan peran *Subsidiary Body for Implementation* dibawah UNFCCC, telah disepakati berbagai komitmen untuk membantu negara-negara berkembang terkait pemahaman dan penilaian atas dampak perubahan iklim. Komitmen tersebut diantaranya, strategi adaptasi yang diintegrasikan ke dalam pembangunan berkelanjutan; dukungan finansial; peningkatan kapasitas, pelatihan dan kesadaran publik; dan mempromosikan transfer teknologi (UNFCCC, 2007). UNFCCC juga memfasilitasi pertukaran pengalaman dan informasi melalui workshops regional yang bertujuan untuk membantu negara berkembang dan negara pulau kecil yang sedang menghadapi ancaman dan resiko perubahan iklim (UNFCCC, 2007). Perubahan iklim membutuhkan kerangka kerja global yang dapat membantu negara-negara dengan tingkat kerentanan tinggi agar dapat beradaptasi. Melalui kebijakan, aksi-aksi peduli dan kolaboratif, menjadikan UNFCCC sebagai ruang yang dapat memfasilitasi penyuaan isu perubahan iklim oleh negara-negara kecil dan lemah.

Dalam PBB, pembuatan aturan mengenai iklim internasional memiliki rezimnya tersendiri. Sayangnya, rezim iklim global tersebut masih bersifat eksklusif dan kurang melibatkan peran Oseania. Dikarenakan, negara-negara Oseania dikategorikan sebagai negara small-island developing states oleh PBB pada tahun 2014 (UN, 2014). Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri karena pengaruh yang diberikan oleh negara kecil seringkali kurang didengarkan. Hal tersebut menuntut Oseania untuk menyusun strategi agar dapat memberikan pengaruhnya dalam PBB. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diplomasi iklim ke UNFCCC.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis membagi tulisan ini menjadi lima bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan, seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya. Bagian kedua merupakan bagian metodologi penelitian yang berupa metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan secondary data yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ketiga merupakan kerangka berpikir teoritis yang berupa konsep diplomasi iklim. Bagian keempat merupakan hasil diskusi dan analisis permasalahan setelah dikaitkan dengan kerangka teori. Pada bagian akhir, peneliti menyampaikan sebuah kesimpulan dari keseluruhan tulisan dalam penelitian yang telah dirancang. Berbagai kerangka penulisan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berupa, **Bagaimana relevansi diplomasi iklim negara Oseania dalam resolusi UNFCCC?**

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini, peneliti menggunakan metodologi kualitatif. Creswell (2013), menjelaskan alasan dibalik penggunaan metodologi kualitatif. Metodologi ini dapat digunakan ketika ingin menganalisis sebuah fenomena sosial yang tidak dapat terlihat dan terukur secara numerik (Creswell, 2013). Penelitian kualitatif memanfaatkan keunggulan interpretatif peneliti untuk menceritakan kembali hasil analisis sebuah penelitian. Selain

itu, kualitatif dianggap sesuai untuk memahami permasalahan yang kompleks secara mendalam. Metodologi kualitatif dalam penelitian ini, dilengkapi dengan pendekatan penelitian Studi Kasus dan jenis penelitian yang berupa eksplanasi.

Creswell (2013) membagi pendekatan penelitian dalam metode kualitatif menjadi 4 bentuk, salah satunya adalah Studi Kasus. Pendekatan penelitian Studi Kasus digunakan ketika ingin menyelidiki satu atau dua kasus sosial dalam periode waktu tertentu (Creswell, 2013). Variasi dan pedalaman data dibutuhkan dalam pendekatan penelitian ini untuk mendapatkan hasil secara terperinci. Pendekatan penelitian Studi Kasus Instrumental Tunggal yang berfokus pada analisis satu kasus sosial dianggap cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kasus atau peristiwa diplomasi iklim negara-negara Oseania dalam UNFCCC. Selain itu, penulis pun menggunakan penelitian eksplanasi sebagai upaya untuk memahami hubungan kausalitas antar variabel. Penelitian eksplanasi umumnya digunakan untuk menganalisis alasan terjadinya suatu fenomena sosial, serta untuk melihat bagaimana variabel X dapat mempengaruhi variabel Y.

Penulis mengkolaborasikan ketiga instrumen penelitian tersebut guna memahami dan menganalisa terjadinya sebuah fenomena sosial secara mendalam. Peneliti menetapkan batasan waktu dalam penelitian kali ini untuk mendapatkan fenomena yang spesifik. Maka, penulis menetapkan persetujuan Paris Agreement sebagai batasan awal kasus ini. Penulis berupaya mengeksplorasi secara mendalam mengenai relevansi diplomasi iklim yang digunakan Oleh negara-negara Oseania. Selain itu, penulis pun berupaya untuk mengetahui alasan mengapa kumpulan negara tersebut proaktif dalam diplomasi iklim di UNFCCC sehingga menghasilkan perubahan proses didalamnya.

Penulis memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Berdasarkan pengertiannya, data sekunder merupakan sekumpulan sumber data yang telah diolah atau dipublikasikan secara resmi (Lamont, 2015). Data sekunder berasal dari berbagai sumber, seperti koleksi media, berita, dokumentasi serta arsip yang dapat ditemui melalui laman resmi dari berbagai lembaga tertentu. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berbasiskan dokumen dan internet. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kedua jenis yakni primer dan sekunder. Selain itu, internet pun digunakan oleh penulis untuk berbagai tujuan dan bentuk, seperti ensiklopedia yang digunakan untuk mencari informasi terbaru. Selain itu, penulis juga menggunakan website resmi dari berbagai lembaga untuk mencari data terperinci yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian, internet juga digunakan untuk mendapatkan berbagai publikasi tertulis seperti jurnal atau buku dan media lainnya yang dapat diakses dan didapatkan secara daring.

Sedangkan, analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pendekatan penelitian Studi Kasus. Pendekatan Studi Kasus berupaya untuk mendeskripsikan sebuah kasus secara mendalam, membutuhkan berbagai sumber data yang dianalisa guna mencari pembuktian, dan mengetahui latar kejadian dari sebuah peristiwa. Berdasarkan Creswell (2013), terdapat 4 tahapan dalam interpretasi data dalam pendekatan penelitian Studi Kasus. Pertama, penulis mencari sekumpulan bukti yang berasal dari berbagai sumber data untuk mencari korelasi dan relevansi makna dengan permasalahan penelitian.

Setelah pengumpulan bukti tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yakni melakukan interpretasi langsung. Dalam interpretasi langsung, peneliti mengacu

kepada satu contoh atau bukti dan menarik makna secara langsung dari bukti tunggal tersebut. Jika menggunakan pendekatan penelitian Studi Kasus Kolektif, peneliti menganalisis korelasi dan menghubungkan antar kedua kasus. Mekanisme tersebut bertujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Ketiga, melakukan interpretasi naturalistik. Dalam tahapan ini, penulis menganalisis deskripsi, aspek dan pandangan yang terdapat dalam suatu kasus. Setelah menghadapi tahap ketiga, data tersebut dikumpulkan dan dibagi kedalam beberapa kategori berdasarkan hasil interpretasi data. Kemudian, hasil dari pengkategorian tersebut disusun kembali dalam tema yang lebih besar.

Kerangka Konseptual

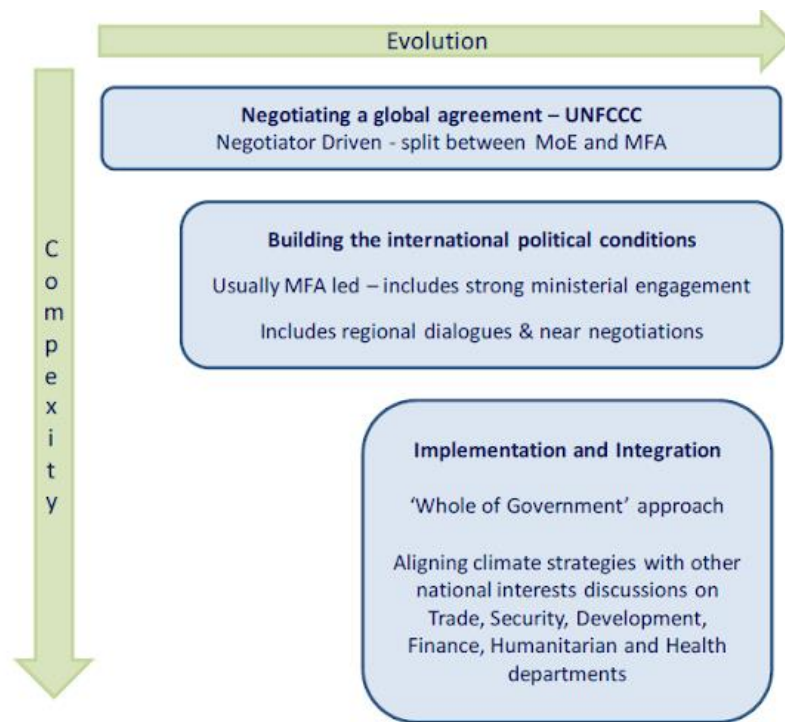
Diplomasi Iklim

Dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata tidak hanya menuntut para pemimpin negara untuk responsif dalam upaya mitigasi, penanganan, dan adaptasi dalam menjawab tantangan-tantangan iklim. Tidak hanya cepat, permasalahan perubahan iklim juga memerlukan respons ekstensif. Artinya, aksi iklim memerlukan koordinasi dan kerjasama yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari negara hingga masyarakat sipil. Terlebih lagi, permasalahan perubahan iklim merupakan isu yang multidimensi sehingga menghasilkan dampak yang beragam, bergantung pada faktor geografis, budaya, dan lanskap sosial-ekonomi (Hristova & Chankova, 2020). Hristova & Chankova (2020) menuliskan bahwa perubahan iklim telah memicu bertambahnya pendekatan-pendekatan baru dalam pembentukan dialog global dari dampak dan solusi dari perubahan iklim. Perlu dicatat bahwa trend yang ada menunjukkan bahwa setiap negara mendefinisikan perubahan iklim dengan berbeda. Para diplomat memiliki peran penting untuk mendefinisikan kondisi ini (Hristova & Chankova, 2020).

Bagi seorang diplomat, perubahan iklim merupakan isu di arena lintas sektor untuk pengaruh internasional sehingga sebuah isu di salah satu bidang ini dapat digunakan oleh suatu partai atau koalisi partai untuk memaksakan hasil di bidang lain (Light, 2017). Dengan ini, diplomasi iklim muncul sebagai salah satu konsep yang memperkaya diskusi diplomasi modern di tengah ketidakpastian permasalahan iklim. Diplomasi berperan untuk menyelaraskan isu iklim dengan prioritas kepentingan nasional (Mabey et al., 2013). Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa diplomasi iklim adalah hasil interaksi dari debat kepentingan nasional dan kerja sama internasional. Maka, penerapan diplomasi iklim sangat penting untuk mendefinisikan kembali kepentingan nasional di dalam negeri dan mempengaruhi perdebatan di panggung internasional.

Herrera dan Shrestha (2015) dalam ‘Cities and Climate Diplomacy in the Asia-Pacific’ berusaha untuk menggagas kerangka konseptual dari diplomasi iklim. Menurut penulis, terdapat tiga syarat untuk diplomasi iklim dilakukan. Pertama, terdapat hubungan atau interaksi antara antar aktor terkait isu iklim yang melampaui batas politik. Kedua, Aktor-aktor memiliki kepentingan untuk menjaga kepentingan atau mengamankan posisi menguntungkan berdasarkan interaksi atau hubungan tersebut. Ketiga, kepentingan itu ditujukan untuk mendapatkan pengaruh tertentu dalam tata kelola iklim global. Untuk aktor yang terlibat, tidak sebatas aktor dari pemerintahan saja. Saat ini, dalam forum-forum internasional yang membahas permasalahan iklim, aktor bisnis hingga masyarakat sipil pun dilibatkan sebagai representasi yang lebih inklusif (Amul & Shrestha, 2015)

Karena studi yang belum matang dan minimnya penelitian dari akademisi di bidang terkait, tulisan ini menemukan adanya keterbatasan literatur dari diplomasi iklim. Namun, setidaknya terdapat beberapa literatur terdahulu yang telah berupaya membangun kerangka konseptual untuk menentukan lingkup dan batasan dari konsep diplomasi iklim. Secara umum, diplomasi iklim dipahami sebagai aktivitas negosiasi oleh para aktor yang terlibat dalam UNFCCC yang berupaya untuk mencapai konsensus seputar emisi gas rumah kaca (greenhouse gas/GHG) (Amul & Shrestha, 2015). Akan tetapi, praktik diplomasi iklim lebih dari pemahaman tersebut. Konsep diplomasi iklim terus berkembang, baik lingkup dan kompleksitasnya, mengikuti perubahan-perubahan pada rezim iklim internasional (Hristova & Chankova, 2020). Singkatnya, diplomasi iklim merupakan praktik, mekanisme, respon yang ditujukan untuk membentuk rezim iklim internasional serta memastikan efektivitas implementasinya (Mabey et al. 2013; Amul & Shrestha, 2015; Hristova & Chankova, 2020). Oleh karena itu, evolusi rezim iklim internasional dipengaruhi dan mempengaruhi praktik dari diplomasi iklim itu sendiri (Mabey et al., 2013).



Gambar 3. Evolusi praktik diplomasi iklim

Sumber: Amul & Shrestha, 2015

Jika merujuk pada definisi diplomasi iklim sebelumnya i.e. diplomasi yang berperan untuk mengkonstruksi rezim iklim internasional serta memastikan efektivitasnya, maka aktivitas diplomasi iklim termasuk, namun tidak terbatas pada: melakukan penilaian terhadap kepentingan dan niat negara lain, mengeksplorasi peluang bisnis rendah karbon (Mabey, Gallagher, & Born, 2013), mengkomunikasikan biaya-untung (cost-benefit) dari aksi iklim (Hristova & Chankova, 2020), perjuangan atas keadilan iklim, mempromosikan legitimasi diri sebagai pemimpin dalam aksi iklim (Light, 2017), dan mendorong kerja sama untuk upaya mitigasi, adaptasi, dan resiliensi (Amul & Shrestha, 2015). Sebagai tambahan, Mabey et al (2013), menuliskan bahwa diplomasi iklim cenderung berfokus pada

penyebab-penyebab minimnya efektivitas dari rezim iklim internasional saat ini, seperti kegagalan untuk mencapai perjanjian politik yang adil, kegagalan untuk merumuskan visi yang ambisius, dan kegagalan dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proliferasi Kebijakan Ramah Iklim Dibawah Kerangka Kerja UNFCCC

Negara-negara Oseania secara kolektif mendorong perubahan dalam rezim iklim internasional agar dapat berprogres lebih efektif. Solidaritas negara Oseania dalam meminta tuntutan tersebut direfleksikan melalui pendapat yang dikemukakan oleh beberapa negara Oseania dalam forum The United Nations Third Small Islands Developing States Conference pada 2014 (Carter, 2015). Salah satunya datang dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tuvalu dalam Carter (2015), bahwa 'negosiator dari Oseania haruslah sinkron di UNFCCC'. Hal tersebut merupakan bentuk dari frustrasi negara-negara Oseania pada kondisi tersebut ketika mempersiapkan COPs 2015 di Paris (Carter, 2015). Pendapat tersebut membuat mayoritas negara kawasan Oseania melancarkan diplomasi iklimnya dengan memanfaatkan peran dari UNFCCC.

Beragamnya koalisi iklim intra-regional, membuat Oseania semakin proaktif dalam melakukan diplomasi iklim. Carter (2015), mengutip pendapat yang dikeluarkan oleh Presiden Kiribati, Aote Tong bahwa 'Kita (Oseania) perlu membangun suatu aliansi non-tradisional yang dapat melayani kepentingan terbaik Kita'. Pendapat tersebut diwujudkan dengan keterlibatan Oseania dalam beberapa koalisi iklim intra-regional. Tidak hanya itu, pembentukan koalisi intra-regional merupakan bentuk respon atas ketidakpuasan Oseania terhadap diplomasi dalam forum PBB (Carter, 2015). Dalam hal ini, mereka lebih memilih untuk menyebarkan nilai diplomasinya melalui koalisi intra-regional yang terbentuk atas kesamaan nasib dan kepentingan (Goulding, 2015).

Setelah terbentuknya berbagai koalisi intra-regional, perubahan kebijakan dalam UNFCCC juga melahirkan berbagai lembaga (regional maupun global) yang berfokus menangani perubahan iklim (Denton, 2018). Keberagaman lembaga iklim tersebut juga dimanfaatkan oleh negara Oseania untuk menyebarkan nilai dan kepentingan yang mereka miliki. Kepulauan Marshall menjadi salah satu anggota dari kepulauan Oseania yang proaktif dalam berbagai forum internasional (Carter, 2015). Sedangkan dalam lingkup PBB sendiri, negara Oseania dikelompokkan dalam satu grup yang bernama PSIDS (Pacific Small Island Developing States) (Goulding, 2015). Penggabungan tersebut membuat suara Oseania semakin terdengar di berbagai rangkaian COP, seperti di Cancun; Durban; and Doha (Manoa, 2015). Diplomasi satu suara ini sejalan dengan tanggapan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Kepulauan Marshall, Tony de Brum bahwa perlu adanya merek diplomasi baru untuk menyuarakan pendapat Oseania, yaitu melalui diplomasi satu suara (Carter, 2015). Keberagaman koalisi dan lembaga dalam rezim iklim global juga memberikan dampak terhadap mekanisme negosiasi internal UNFCCC (Manoa, 2015). Negosiasi kebijakan yang terjadi dalam UNFCCC terbagi kedalam dua tahap, dimana tahap pertama adalah negosiasi yang dilakukan dalam lingkup koalisi, yang nantinya hasil dari negosiasi tersebut dikemukakan dalam COP atau Subsidiaries Bodies (Manoa, 2015).

Keaktifan diplomasi iklim oleh negara-negara Oseania telah mendorong kesadaran atas urgensi untuk menangani tantangan iklim, baik dalam upaya mitigasi dan adaptasi

(Denton, 2018). Peningkatan dan penguatan komitmen negara-negara untuk memberikan bantuan dana iklim internasional merupakan salah satu respon global terhadap penanganan isu iklim. Seperti yang dilaporkan oleh Oxfam (2016), bahwa pada tahun 2010, berbagai negara maju di dunia telah bersepakat untuk mengumpulkan dana sebesar USD \$100 miliar per tahun pada 2020. Dana tersebut guna mengatasi dampak yang dihasilkan akibat perubahan iklim. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OECD, berbagai negara maju telah mengumpulkan sekitar USD \$62 miliar dari total USD \$100 miliar untuk pendanaan iklim internasional (Oxfam, 2016). Kesepakatan bantuan dana ini merupakan bentuk komitmen dari negara maju dalam KTT Kopenhagen yang dilakukan pada 2009 lalu (Betzold, 2016). Dalam kurun waktu 2010 dan 2014, negara-negara Oseania mendapatkan bantuan dana sebesar USD \$705 juta, dengan 84% (US\$595 juta) berasal dari donor bilateral, dan 16% (US\$110 juta) dari donor multilateral (Betzold, 2016).

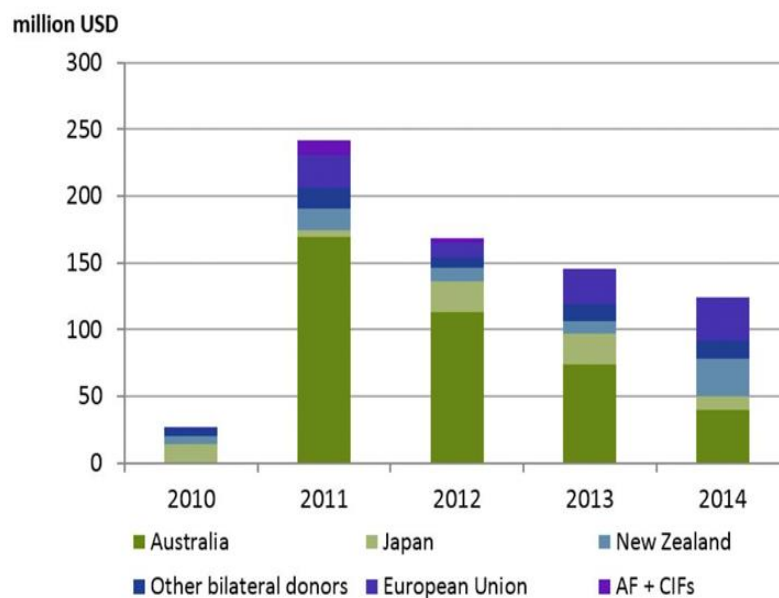


Diagram 1. Bantuan dana untuk adaptasi perubahan iklim, tahun 2010-2014

Sumber: Betzold, 2016

Green Climate Fund (GCF) menjadi pilar utama pembiayaan iklim multilateral. Dibawah naungan COP UNFCCC, GCF juga berperan sebagai distributor utama dana iklim internasional kepada negara-negara berkembang pada beberapa tahun mendatang (Denton, 2018). Mereka pun mempromosikan program yang terkait mitigasi karbon agar menciptakan ketahanan lingkungan (Oxfam, 2016). Sejak pendiriannya, GCF telah menghibahkan dana sebesar \$10 miliar pada Juni 2016 untuk penanganan iklim global (Oxfam, 2016).

Dalam pertemuan GCF pada 2015 lalu, telah disetujui sekitar 8 dana hibah (USD \$168 juta) untuk keperluan penanganan iklim global (Oxfam, 2016). Sebanyak dua dari delapan dana hibah tersebut dialokasikan kepada negara Fiji dan Maladewa sebagai bentuk bantuan SIDS (Oxfam, 2016). Serahin setelahnya, GCF juga menyetujui dana hibah sebesar USD \$36 juta yang ditujukan untuk menggerakkan TCAP (Tuvalu Coastal Adaptation Project) (Oxfam, 2016). Pendanaan GCF tersebut juga berdampak positif kepada perekonomian negara-negara Oseania, sebanyak 30% GDP Samoa terdiri dari sisa pendanaan GCF dan

ODA (Oxfam, 2016). Selain itu, GCF membentuk Pacific Islands Renewable Energy Investment Program yang dilaksanakan sejak 15 Desember 2016 hingga 16 Juli 2025 (Oxfam, 2016). Program tersebut sebagai upaya untuk membantu negara SIDS keluar dari penggunaan energi fosil (Oxfam, 2016).

Berdasarkan Betzold (2016) deklarasi Kaniaki II juga membahas mengenai berbagai hal lain, seperti UN Secretary-General's Climate Action Summit, 25th session of the Conference of the Parties (COP 25), dan the SAMOA Pathway Review. The SAMOA Pathway Review merupakan sebuah bentuk umpan balik terhadap berbagai aksi efektif dan terukur untuk mengatasi perubahan iklim global. Dalam hal ini, Secretary General PIF, Meg Taylor mengatakan bahwa Deklarasi Kaniaki II dianggap sebagai deklarasi statement terkuat yang pernah dikeluarkan oleh suatu forum. Taylor juga mengakui bahwa pembahasan dalam forum tersebut harus dilakukan masa depan kawasan Oseania. Selain itu, menteri-menteri ekonomi di kawasan Oseania menyetujui proposal Pacific Resilience Facility (Betzold, 2016). Pembangunan Pacific Resilience Facility berperan sebagai platform keuangan yang akan mengerahkan dana untuk penanganan bencana yang ditunjukkan oleh perubahan iklim di kawasan Oseania.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, perubahan iklim menimbulkan ancaman bagi kawasan Oseania. Untuk memitigasi dampak tersebut, Oseania telah melakukan berbagai upaya seperti membangun koalisi dan lembaga, serta berbagai proyek yang mendukung adanya transisi energi baru dan terbarukan (ADB, 2020). Beberapa upaya tersebut pun menjadi bentuk dari adanya peningkatan kesadaran global terhadap isu lingkungan. Selain itu, pergeseran dalam UNFCCC, membuat suara dari negara-negara kecil lebih terdengar dan melahirkan berbagai lembaga-lembaga iklim baru. Hal ini menimbulkan perubahan strategi diplomasi dari negara-negara di dunia, seperti ketika Oseania membuat koalisi AOSIS dan PSIDS. Perubahan strategi tersebut dilakukan guna menyesuaikan dengan apa yang terjadi di dalam rezim iklim global.

Dari berbagai forum yang telah diselenggarakan serta melibatkan Oseania, telah membuat peningkatan kesadaran dari masyarakat global terkait perubahan iklim yang tengah terjadi. UNFCCC, sebagai rezim iklim global memiliki implementasi yang cukup efektif karena dapat menarik perhatian dari masyarakat global terhadap isu perubahan iklim. Seperti halnya forum Deklarasi Kaniaki II yang mendapat pengakuan global sebagai forum iklim dengan pernyataan terkuat. Deklarasi tersebut mendorong negara-negara melakukan berbagai aksi penanganan iklim, seperti pendanaan iklim global, GCF, dan Green Investment (ADB, 2020). Dikarenakan adanya efek domino yang dirasakan akibat perubahan iklim.

Kedekatan lokasi geografis antara Australia dan Selandia Baru dengan negara-negara Oseania menyebabkan kedua negara tersebut menghadapi ancaman dan tantangan yang sama di tengah krisis iklim. Dengan diplomasi iklim yang dilakukan oleh negara-negara Oseania, kedua negara tersebut pun mengambil langkah yang lebih konkrit. Hal ini tentunya mengakibatkan peningkatan kesadaran dari terjadinya Perubahan rezim iklim internasional juga mendorong negara-negara di dunia yang semula mengandalkan energi fosil sebagai energi utama, menjadi beralih kepada transisi energi yang lebih bersih. Bentuk nyata transisi energi tersebut dapat terlihat dari banyaknya negara yang telah melakukan investasi teknologi hijau, serta berkontribusi aktif dalam program dana iklim hijau sebagai bentuk kesadaran mereka terhadap perubahan iklim saat ini. Dalam hal ini,

UNFCCC meningkatkan dan menguatkan komitmen negara-negara di dunia dalam penanganan permasalahan perubahan iklim.

Analisis ini sejalan dengan asumsi yang tercantum dalam kerangka teori sebelumnya. Hirstova & Chankova (2020), mengemukakan bahwa adanya perkembangan dalam konsep diplomasi iklim yang juga menjadi cerminan terhadap perubahan yang terjadi dalam rezim iklim global. Temuan dalam penelitian ini selaras dengan bagaimana diplomasi iklim negara-negara Oseania dapat menggeser paradigma rezim iklim internasional; menjadi lebih sensitif terhadap perbedaan beban dan tanggung jawab dalam aksi iklim serta dialog yang lebih inklusif. Pergeseran kebijakan adaptasi UNFCCC membuat suara dan nilai diplomasi iklim negara kecil seperti Oseania menjadi lebih terdengar. Hal ini dikarenakan diplomasi iklim yang dilakukan tersebut merupakan sekumpulan praktik, mekanisme dan respon yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan memastikan efektivitas dalam rezim iklim global (Hirstova & Chankova, 2020). Artinya, diplomasi iklim oleh negara-negara Oseania yang mendorong pendekatan lebih inklusif dan sensitif dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim diharapkan dapat menghasilkan inisiatif yang lebih legitimate. Ketika suara negara-negara yang awalnya tersubordinasi dalam forum-forum tersebut mulai dilibatkan, hasil kesepakatan dapat lebih efektif.

B. Mendorong Inklusivitas dalam UNFCCC sebagai Rezim Iklim Global

Adanya masalah ketimpangan dalam tata kelola iklim global mengindikasikan minimnya nilai keadilan dalam rezim iklim internasional, khususnya UNFCCC. Posisi tawar negara-negara Selatan ketika berada di dalam proses pengambilan keputusan cenderung tidak strategis. Hal ini dapat kita lihat melalui 1) Perjanjian Paris menerima kritik karena perannya yang kurang dalam mempromosikan peran negara-negara Selatan dan cenderung mengabaikan perlindungan untuk mereka padahal negara-negara tersebut adalah yang paling rentan atas dampak perubahan iklim (Lyster, 2017); 2) Terhambatnya pembangunan di negara berkembang karena perjanjian iklim.

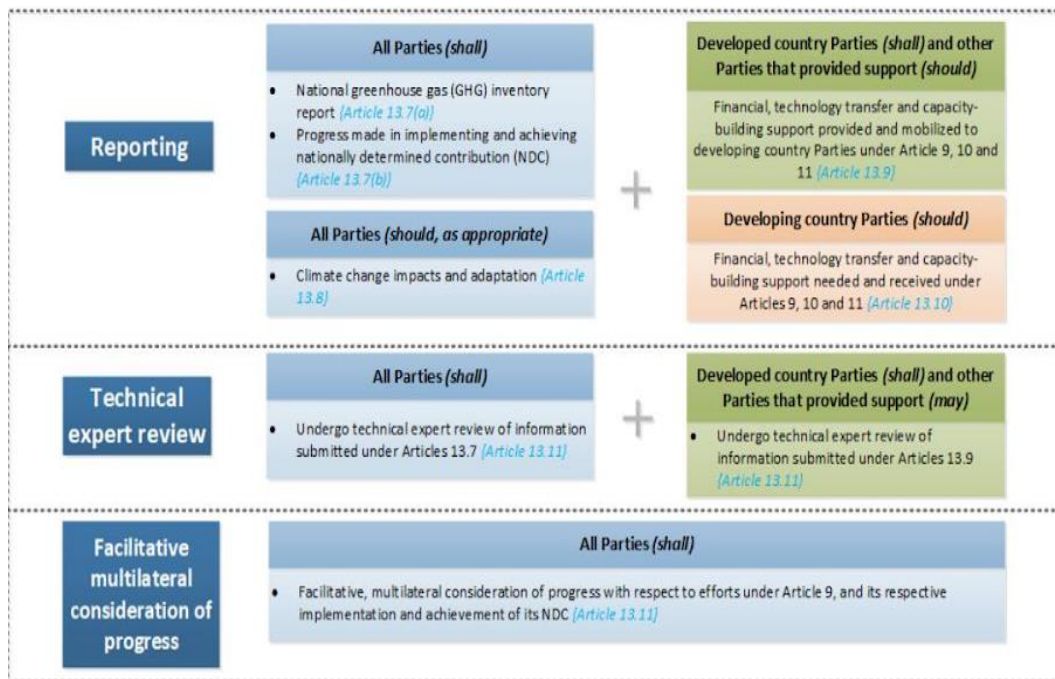
Pencapaian yang signifikan dari UNFCCC tercermin dari adanya kesepakatan terhadap adaptasi konsep Common But Differentiated Responsibilities (CBDR), atau prinsip terkait pemerataan tanggung jawab terhadap penanganan isu iklim global (Epstein, 2015). Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh faktor keterampilan diplomatik serta perhatian terhadap prioritas negara berkembang dalam hal adaptasi, keuangan, teknologi, dan capacity-building. Bersamaan dengan itu, menjaga kontributor terbesar emisi karbon untuk senantiasa berada di dalam kesepakatan yang menempatkan tanggung jawab pada mereka sementara juga memberikan semua negara kursi untuk bersuara telah menjadi tantangan bagi Perjanjian Paris dan UNFCCC. Pencapaian ini tidak dapat dipisahkan dari diplomasi iklim negara-negara kecil termasuk negara-negara Oseania dalam forum iklim di bawah UNFCCC.

Maka dari itu, kehadiran rezim yang adil dan inklusif dibutuhkan, karena dalam perkembangannya kekuatan dunia akan bersifat semakin dinamis (UN, 2016). Dalam kasus UNFCCC, inklusivitas diperlukan agar terciptanya ruang yang cukup bagi seluruh negara (Okereke & Coventry, 2016). Pada praktiknya, UNFCCC terus melakukan tindakan untuk meningkatkan keadilan rezimnya. Salah satu yang pernah dilakukan adalah dengan memberikan tingkat tanggung jawab yang berbeda kepada setiap negara. Namun, menurut Okereke & Coventry (2016), banyak pertanyaan muncul terkait dengan siapa yang

menerima bantuan tersebut. Di sisi lain, Paris Agreement yang dianggap sebagai salah satu titik balik dalam aksi iklim global pun bahkan dianggap kurang adil. Perjanjian Paris dianggap kurang adil karena memberikan target iklim yang sama untuk setiap negara, tanpa memperhatikan kondisi negara tersebut (Okereke & Coventry, 2016). Dari kasus tersebut dapat terlihat jika dalam setiap keputusannya, rezim masih dianggap kurang inklusif dan adil. Maka dari itu, salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan memberikan peran bukan hanya ke negara besar, tetapi juga ke negara kecil.

Dalam rangka mewujudkan rezim yang inklusif, keberpihakan segala pihak diperlukan. Salah satu pihak yang penting untuk terlibat dalam rezim adalah negara kecil (*small country*). Menurut Frankel (2012), kehadiran negara kecil dalam suatu tatanan internasional dapat mendatangkan ide-ide baru yang tidak pernah didengar oleh negara besar. Hal ini berarti negara kecil dapat berperan untuk membawa isu-isu dan solusi-solusi baru yang tidak pernah hadir sebelumnya. Selain itu, karakteristik dari negara kecil yang lebih bersikap “merangkul” pun meningkatkan inklusivitas dari rezim itu sendiri. Biasanya, negara kecil bertindak dengan cara mengajak negara kecil lainnya untuk berjalan sebagai rekan yang setara dalam diskusi global (McLay, 2011). Dengan hadirnya negara-negara kecil dalam susunan rezim internasional, maka rezim tersebut dapat semakin inklusif. Terangkatnya isu-isu baru ke dalam rezim juga membuat rezim akan lebih adil dalam menyelesaikan suatu permasalahan global. Maka dari itu, dalam konteks rezim internasional, kehadiran negara-negara kecil penting untuk menjadikan rezim menjadi lebih inklusif dan adil.

Dalam praktiknya, negara-negara Oseania membuat aliansi (AOSIS dan SIDS) antar negara-negara kepulauan kecil agar menguatkan suara yang dimilikinya (Ourbak & Magnan, 2017). Selain agar suara yang dimilikinya semakin didengar, tindakan yang dilakukan negara-negara Oseania ini menandakan bahwa Oseania berusaha mengajak negara-negara kepulauan kecil lainnya agar dapat menyatukan suara dan menjadi rekan yang setara. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran Oseania melalui AOSIS dan SIDS menunjukkan bahwa rezim bersikap semakin inklusif. Selain hadir, AOSIS juga berperan dalam membuat rezim iklim semakin inklusif ketika negara-negara kepulauan kecil ini mengawali ratifikasi Perjanjian Paris. Menurut Ourbak & Magnan (2017), negara yang mengawali ratifikasi adalah negara dari Oseania berupa Fiji, kemudian diikuti oleh negara AOSIS lainnya. Dengan mengawali ratifikasi dalam konteks iklim, hal ini membuktikan bahwa rezim iklim global tidak lagi bersifat mementingkan kepentingan Negara Besar saja, akan tetapi telah menjadi kepentingan semua.



Gambar 4. Article 13 of the Paris Agreement Tentang Sistem Laporan dan Ulasan

Sumber: UNFCCC, n.d.

Peran yang Oseania miliki dalam menangani isu iklim pun tidak berhenti sampai disitu. Oseania juga berperan dalam melakukan perubahan besar di tubuh UNFCCC. Dalam melakukan perubahan, Oseania melalui AOSIS berhasil merubah sistem laporan ke UNFCCC agar lebih fleksibel dan juga transparan (Ourbak & Magnan, 2017). Hal ini kemudian dapat terlihat pada gambar 4 yang menunjukkan bahwa UNFCCC telah mengklasifikasikan bentuk laporan berdasarkan jenis negaranya. Dalam hal ini, setiap negara tetap diberi kerangka aksi dan dukungan yang sama, namun untuk negara berkembang (developing countries) seperti dalam Oseania, hal tersebut dapat lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan masing-masing negara (UNFCCC, n.d.). Dengan hadirnya gagasan dan kerangka kerja yang baru ini, diharapkan semua negara dapat lebih memperhatikan isu lingkungan. Dari bukti ini, dapat dikatakan jika kehadiran Oseania membuat rezim iklim global, yang dalam hal ini Perjanjian Paris, dapat lebih inklusif karena mulai memperhatikan keterbatasan negara lain dalam memenuhi target iklim global.

Selain berkontribusi dalam merubah sistem laporan dalam UNFCCC, Oseania juga berkontribusi dalam menetapkan kerangka kerja dalam jangka panjang. Menurut Ourbak & Magnan (2017), Oseania melalui AOSIS berusaha menentukan target jangka panjang berupa kontrol akan kenaikan suhu bumi maksimal pada suhu 1,5 derajat celcius. Saran dari AOSIS ini kemudian berhasil diimplementasikan menjadi Artikel 2 dalam Perjanjian Paris. Artikel ini berisi tentang Long-term temperature goal yang membahas tentang kenaikan suhu global yang harus dibawah 2 derajat celcius, dan terus berusaha untuk meningkatkannya menjadi 1,5 derajat celcius (UNFCCC, 2018). Dari usaha yang dilakukan oleh AOSIS ini membuktikan bahwa isu tentang suhu bumi yang sebelumnya tidak diatur dalam perjanjian global iklim menjadi terangkat setelah adanya saran dalam

forum Perjanjian Paris. Hal ini tentu merubah kerangka bekerja dari rezim iklim global untuk terus berusaha mencapai tujuan jangka panjang ini. Perubahan kerangka kerja ini mencakup usaha dalam melakukan mitigasi dan adaptasi, investasi rendah karbon, dan teknologi komunikasi yang penting dalam menangani kasus perubahan iklim (Gao et al., 2017). Dengan berubahnya kerangka kerja dalam tubuh UNFCCC, dapat menjadi salah satu faktor bahwa usaha diplomasi Oseania dalam UNFCCC berhasil.

C. Legitimasi Pengetahuan Tradisional Terhadap Aksi Iklim Dibawah UNFCCC

Keterbatasan akses informasi yang relevan tentang strategi adaptasi perubahan iklim kontemporer merupakan tantangan sendiri bagi masyarakat negara-negara Oseania (Inamara & Thomas, 2017). Di sisi lain, pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh penduduk lokal maupun masyarakat adat sering kali diabaikan dalam kerangka kerja UNFCCC (Comberti et al, 2019). Padahal, banyak literatur menyoroti bahwa pengetahuan lokal dapat memainkan peran penting dalam adaptasi perubahan iklim, terutama di negara-negara pulau kecil. Negara-negara Oseania, secara khusus Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, dan Kiribati, merespons dan mempelajari perubahan iklim tidak hanya dari ilmuwan ataupun donor internasional, melainkan melalui pendekatan adaptasi tradisional yang diturunkan dari generasi-generasi (lihat Bryant-Tokalau, 2018). Sebuah penelitian terbaru oleh Scally & Doberstein (2021) menemukan bahwa penduduk Cook Islands berpendapat bahwa pengetahuan lokal merupakan sumber yang signifikan bagi pembentukan kebijakan penanganan iklim karena lebih relevan, reliable, dan berkelanjutan untuk memahami dinamika perubahan lingkungan yang ada. Sangat penting bagi pemangku kebijakan untuk memahami bahwa strategi mitigasi dan penanganan iklim harus disesuaikan dengan karakter lingkungan yang unik, keragaman yang ada, dan sumber daya yang ada untuk mendukung strategi.

Subordinasi pengetahuan lokal dalam diskusi penanganan aksi iklim salah satunya disebabkan oleh dominasi Barat dalam pembentukan narasi terkait perubahan iklim. Sebagai konsekuensinya, minimnya apresiasi terhadap kepemimpinan negara-negara Pasifik dalam aksi iklim diperparah oleh bias dalam penelitian iklim yang memprioritaskan solusi sains dan teknologi barat di atas sistem pengetahuan lainnya (Jasanoff, 2007; Alston, 2014 dalam Mcleod et al., 2019). Solusi yang diusulkan untuk dampak perubahan iklim di Kepulauan Pasifik sering kali dipaksakan secara tidak kritis dari tempat lain dan sering kali terbukti tidak sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya mereka (Nunn, 2009). Dalam konteks ini, pendekatan top-down antara donor dengan penerima tidak lagi efektif. Hal ini mengindikasikan pentingnya untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam strategi mitigasi dan adaptasi iklim di berbagai bagian di dunia. Adanya celah dalam kebijakan untuk merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan yang dimanifestasikan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 – dengan visi ‘no one left behind’ yang inklusif – salah satunya dapat diatasi dengan menggabungkan pengetahuan lokal untuk mengubah pemahaman dan operasionalisasi pembangunan (Ahmadzai, 2020).

Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dalam melakukan aksi iklim, negara-negara Oseania juga nampak mencari legitimasi untuk memegang posisi sebagai pemimpin dalam aksi iklim global, meskipun sejauh ini belum terdapat dokumen resmi yang menyatakan demikian. Akan tetapi, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Monash University pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kebanggaan para pemimpin negara

Oseania diilustrasikan dengan baik oleh jurnalisme di kawasan. Narasi ini berhubungan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik dan politisi mereka sebagai pemimpin global aksi iklim dan membingkai kepemimpinan sebagai sosok yang kuat dan efektif dalam menciptakan perubahan di panggung global atau regional. Selama periode penelitian tersebut dilakukan, negara-negara Oseania membuat pernyataan tegas dalam berbagai forum diplomasi internasional, serta mengadvokasi kebaikan individu negara-negara di tengah ketidakpastian krisis iklim. Kelompok negara tersebut juga menunjukkan contoh mitigasi, adaptasi dan aksi yang dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim.

Negara-negara Oseania merupakan salah satu koalisi yang melakukan advokasi terkait keterlibatan pengetahuan tradisional dalam aksi iklim global dalam serangkaian forum COP (lihat Comberti et al., 2019). Presiden Fiji pada COP23 mengenalkan dialog Talanoa untuk mengurangi marjinalisasi pengetahuan tradisional dalam proses negosiasi UNFCCC:

“Talanoa adalah kata tradisional yang digunakan di Fiji dan di seluruh Pasifik untuk mencerminkan proses dialog yang inklusif, partisipatif, dan transparan. Tujuan Talanoa adalah untuk berbagi cerita, membangun empati dan membuat keputusan yang bijak untuk kebaikan bersama. Proses Talanoa melibatkan berbagi ide, keterampilan dan pengalaman melalui storytelling. ... Talanoa mendorong stabilitas dan inklusivitas dalam dialog, dengan menciptakan ruang aman [untuk mengambil keputusan demi kebaikan bersama]” (Comberti et al., 2019)

Adanya paviliun Talanoa dalam COP23 mengindikasikan bertambahnya perhatian para pemangku kepentingan untuk melibatkan pengetahuan tradisional dalam kerangka kerja UNFCCC, pun tingkat efektivitasnya masih perlu dikaji. Konsep Talanoa juga digunakan untuk mengkomunikasikan permasalahan perubahan iklim oleh negara-negara Oseania. Sering kali, pengetahuan ini disajikan sebagai solusi untuk perubahan iklim dan narasi pengetahuan tradisional dikaitkan dengan ketahanan dan adaptasi (Holmes & Burgess, 2019).

Seiring dengan keaktifan kelompok masyarakat adat (indigenous people) dalam mengadvokasikan pentingnya pengetahuan tradisional di level internasional, pengetahuan lokal atau tradisional pun mulai mendapat banyak perhatian (Comberti et al., 2019). Komunitas Oseania tidak sendiri untuk mendorong komunitas internasional memberi perhatian terhadap signifikansi pengetahuan lokal dalam aksi iklim global. Adapula keterlibatan dari kelompok adat lain dari berbagai negara, seperti Colombia, Viet Nam, dan negara-negara Afrika. Dibentuknya Local Communities and Indigenous Peoples Platform (LCIPP) di bawah UNFCCC mengindikasikan adanya atensi dunia internasional terkait pentingnya mengembangkan pengetahuan tradisional. LCIPP diharapkan dapat menjembatani tantangan tata kelola dan memastikan pengetahuan tradisional lokal dipertimbangkan dalam penyediaan dana adaptasi internasional (McLeod et al., 2019). Dengan demikian, kolaborasi antara pengetahuan modern Barat dan masyarakat tradisional dapat membantu implementasi strategi mitigasi dan adaptasi iklim.

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa diplomasi iklim tidak hanya digunakan sebagai instrumen luar negeri untuk menekan negara-negara lain segera bertindak merespons krisis iklim. Akan tetapi, dalam konteks negara-negara Oseania, diplomasi iklim juga digunakan untuk mempertahankan relevansi nilai-nilai serta pengetahuan tradisional dalam kerangka kerja di bawah UNFCCC untuk strategi mitigasi dan adaptasi iklim. Sebagai salah satu komunitas yang cukup vokal, negara-negara Oseania berupaya untuk menjadi pemimpin

dalam untuk menyuarakan integrasi pengetahuan lokal dan inisiasi modern Barat. Berbeda dengan Uni Eropa mengklaim sebagai pemimpin aksi iklim karena teknologi dan sektor riset dan pengembangan (R&D) yang telah maju serta didukung dengan institusi yang kuat (lihat Grubb & Gupta (eds.), 2000), negara-negara Oseania lebih menekankan pada keahlian adaptasi di tengah ancaman krisis iklim melalui nilai-nilai dan pengetahuan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

PENUTUP

Sebagai kelompok negara yang paling terdampak oleh krisis iklim, diplomasi iklim merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang vital bagi negara-negara Oseania. Meskipun belum terdapat pendefinisian diplomasi iklim yang konkrit, praktik diplomasi iklim dapat diobservasi secara empiris dalam forum-forum iklim antar negara, termasuk dalam forum di bawah kerangka kerja UNFCCC. Salah satu koalisi negara yang aktif berdiplomasi iklim dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Merujuk pada bab hasil dan diskusi, setidaknya terdapat tiga fokus utama dari diplomasi iklim oleh negara-negara Oseania. Pertama, diplomasi iklim oleh negara Oseania berkontribusi dalam perwujudan aksi yang lebih konkrit dalam resolusi terkait strategi mitigasi dan adaptasi yang dihasilkan oleh negara-negara dalam UNFCCC. Negara-negara Oseania terus memastikan efektivitas rezim iklim yang ada dapat berdampak secara konkrit. Maka, melalui diplomasi iklim, negara-negara Oseania mendorong UNFCCC tidak hanya menjadi rezim iklim yang sebatas pada goal-setting, tetapi juga berisikan aksi konkrit yang harus dilakukan oleh negara-negara. Kedua, diplomasi iklim oleh negara Oseania mendorong UNFCCC sebagai rezim iklim yang inklusif. Artinya, resolusi yang dihasilkan oleh UNFCCC pun proses negosiasi dalam forum di bawah UNFCCC juga melibatkan aspirasi dan partisipasi oleh negara-negara kecil yang sering kali ter subordinasi dalam forum internasional. Ketiga, diplomasi iklim oleh negara Oseania juga ditujukan untuk mencari dukungan dari negara-negara lain untuk melegitimasi posisinya sebagai aktor vital dalam integrasi pengetahuan tradisional dan aksi iklim global. Dengan demikian, diplomasi iklim dapat membuka jalan bagi negara Oseania untuk mencapai kepentingannya di tengah ketidakpastian perubahan iklim dan secara bersamaan mewujudkan rezim iklim yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadzai, A. (2020). Local Knowledge on Development The Missing Link in the Research-Policy Nexus of Sustainable Development. *Journal of Sustainable Development*, 13(2). doi:10.5539/jsd.v13n2p132
- Amul, G. G., & Shrestha, M. (2015). *Cities and Climate Diplomacy in the Asia Pacific*. Adelphi.
- Balik, P. (2008). *Role Of Small States in International Organizations: The Case of Slovakia in the United Nations Security Council*. Central European University.
- Betzold Carola . (2016). Who gives aid for adaptation to climate change in Oceania. Development Policy Center. Retrieved from: (<https://devpolicy.org/gives-aid-adaptation-climate-change-oceania-20160805/>)

- Bhide, J., Frazor, G., Gorman, C., Huitt, C., & Zimmer, C. (2020, May). The Political, Security, and Climate Landscape in Oceania. Retrieved from sites.utexas.edu: http://sites.utexas.edu/climatesecurity/files/2020/05/LBJ_Oceania_Strategy.pdf
- Bryant-Tokalau, J. (2018). *Indigenous Pacific Approaches to Climate Change: Pacific Island Countries*. New York: Springer.
- Carter, G. (2015). Establishing a Pacific Voice in the Climate Change Negotiations. In G. Fry, & S. Tarte, *THE NEW PACIFIC DIPLOMACY*. ANU Press.
- Chandra Peniel. (nd). Oseania: Sebaran Tinggalan Arkeologis serta Hubungan dan Kontak Budaya Austronesia di Kepulauan Pasifik. Academia. Retrieved from: https://www.academia.edu/20559593/Oseania_Sebaran_Tinggalan_Arkeologis_serta_Hubungan_dan_Kontak_Budaya_Austronesia_di_Kepulauan_Pasifi
- Comberty et al. (2019). Comberty, Claudia; Thornton, Thomas F.; Korodimou, Michaela; Shea, Meghan; Riamit, Kimaren Ole (2019). Adaptation and Resilience at the Margins: Addressing Indigenous Peoples' Marginalization at International Climate Negotiations. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 61(2), 14-30. doi:10.1080/00139157.2019.1564213
- Cresswell, J. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 3rd ed. London: SAGE Publications.
- Dasgupta, S., Laplante, B., Meisner, C., Wheeler, D., & Yan, J. (2007, February). The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis. Retrieved from [openknowledge.worldbank.org: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7174/wps4136.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7174/wps4136.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Denton, Ashile Denée. (2018). *Building Climate Empire: Power, Authority, and Knowledge within Pacific Islands Climate Change Diplomacy and Governance Networks*. Portland State University.
- Epstein, C. (2015, December 29). common but differentiated responsibilities. Retrieved January 24, 2022, from Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/common-but-differentiated-responsibilities>
- Eugenia Olivia. (2021). Climate Change Effects in Oceania | World Series Part 4. International Youths Organization for Peace and Sustainability. Retrieved from: <https://www.iyops.org/post/climate-change-effects-in-oceania>
- Frankel, J. (2012, April). What Small Countries Can Teach the World. National Association of Business Economists.
- Gao, Y., Gao, X., & Zhang, X. (2017). The 2 °C Global Temperature Target and the Evolution of the Long-Term Goal of Addressing Climate Change—From the United Nations Framework Convention on Climate Change to the Paris Agreement. *Engineering*, 3, 272-278. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095809917303077>
- Glynn, P. (1993). *Coral reef bleaching: ecological perspectives*. Florida: Coral Reefs.
- Goulding, N. (2015). Marshalling a Pacific Response to Climate Change. In G. Fry, & S.

- Tarte, ed., *The New Pacific Diplomacy*, 1st ed. Canberra: Australian National University Press, pp. 191-202. <https://doi.org/10.22459/NPD.12.2015.16>
- Gupta, J., & Grubb, M. (Eds.). (2000). *Climate Change and European Leadership: A Sustainable Role for Europe?* Netherlands: Springer.
- Holmes, D., & Burgess, T. (2019). *Climate Change Communication in the Pacific Islands: Newspaper Reporting of Climate Change in Nine Pacific Island Countries*. Melbourne: Monash Climate Change Communication Research Hub.
- Hristova, A., & Chankova, D. (2020). Climate diplomacy – a growing foreign policy challenge. *Juridical Tribune*, 10(2), 194-206.
- Inamara, A., & Thomas, V. (2017). Pacific climate change adaptation: The use of participatory media to promote indigenous knowledge. *Pacific Journalism Review*, 23(1), 112-132. Retrieved from <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.960248617551272>
- IUCN. (nd). *Oceania: About*. International Union for Conservation of Nature. Retrieved from: <https://www.iucn.org/regions/oceania/about>
- Khana Madhu. (2020). *GROWING GREEN BUSINESS INVESTMENT IN ASIA AND THE PACIFIC TREND AND OPPORTUNITIES*. Asian Development Bank.
- Lamont, C. 2015. *Research Methods in International Relations*. 1st ed. London: Sage Publications
- Light, A. (2017). Climate Diplomacy. In S. M. Gardiner, & A. Thompson (Eds.), *The Oxford Handbook of Environmental Ethics* (pp. 1-18). Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199941339.013.43
- Lindsey Rebecca. (2021). *Climate Change: Global Sea Level*. Climate. Retrieved from: <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level>
- Lowy Institute. (2020). *Lowy Institute Pacific Aid Map*. Retrieved from [lowyinstitute.org: https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/](https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/)
- Lyster, R. (2017). Climate justice, adaptation and the Paris Agreement: a recipe for disasters?. *Environmental Politics*, 26(3), 438-458. <https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1287626>
- Mabey, N., Gallagher, L., & Born, C. (2013). *Understanding Climate Diplomacy: Building diplomatic capacity and systems to avoid dangerous climate change*. London: E3G (Third Generation Environmentalism).
- Manoa, F. (2015). *The New Pacific Diplomacy at The United Nations: The Rise of the PSIDS*. In G. Fry, & S. Tarte, *The New Pacific DIPLOMACY*. ANU Press.
- McLay, J. (2011, April 27). *Making a Difference: The Role of a Small State at the United Nations*. www.juniata.edu. Retrieved January 23, 2022, from <https://www.juniata.edu/offices/juniata-voices/past-version/media/mclay-making-a-dif.pdf>

- McLeod et al. (2019). Lessons From the Pacific Islands – Adapting to Climate Change by Supporting Social and Ecological Resilience. *PERSPECTIVE*, 6(289). doi:10.3389/fmars.2019.00289
- Meads Sarah & Maclellan Nic. (2016). *AFTER PARIS: CLIMATE FINANCE IN THE PACIFIC ISLAND*. Oxfam.
- Nace, T. (2017). New Study Find 8 Islands Swallowed by Rising Sea Level. Retrieved from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/trevornace/2017/09/09/new-study-finds-8-islands-swallowed-by-rising-sea-level/?sh=37b2663b5283>
- Nunez Christina. (2019). Sea level rise, explained. National Geographic. Retrieved from: <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/sea-level-rise-1>
- Nunn, P. (2009). Responding to the challenges of climate change in the Pacific Islands: Management and technological imperatives. *Climate Research*, 40(2-3), 211-231. doi:10.3354/cr00806
- Nunn, P. D. (2012). Climate Change and Pacific Island Countries. *Unclearn.org*.
- Okereke, X., & Coventry, P. (2016). Climate justice and the international regime: before, during, and after Paris. *Wiley Periodicals*, 7(6), 1-18.
- Ourbak, T., & Magnan, A. K. (2017). The Paris Agreement and climate change negotiations: Small Islands, big players. Springer, 2201-2207. <https://doi.org/10.1007/s10113-017-1247-9>
- Paul Delia. (2019). Pacific Islands Forum issues strongest-ever statement on climate, cites security threat. *Climate Diplomacy*. Retrieved from: <https://climate-diplomacy.org/magazine/environment/pacific-islands-forum-issues-strongest-ever-statement-climate-cites-security>
- Scally, D. d., & Doberstein, B. (2021). Local knowledge in climate change adaptation in the Cook Islands. *Climate and Development*, 1-15. doi:10.1080/17565529.2021.1927658
- Steiner, A. (n.d.). The UN Role In Climate Change Action: Taking The Lead Towards A Global Response | United Nations. the United Nations. Retrieved January 26, 2022, from <https://www.un.org/en/chronicle/article/un-role-climate-change-action-taking-lead-towards-global-response>
- Tarte, S. (2015). A New Pacific Regional Voice? The Pacific Island Development Forum. In G. Fry, & S. Tarte, *The New Pacific Diplomacy*. ANU Press.
- The World Bank. (2012). Acting Today For Tomorrow: A Policy and Practice Note for Climate- and Disaster-Resilient Development in the Pacific Islands Region, with Supporting Research, Analysis, and Case Studies. Retrieved from documents1.worldbank.org: <https://documents1.worldbank.org/curated/ar/351471468098049265/pdf/768450WP0P1267000WB0PPN0Tech0Report.pdf>
- UN. (n.d.). 70 Ways the UN Makes A Difference. United Nations. Retrieved January 13, 2022, from United Nations: <https://www.un.org/un70/en/content/70ways/index.html>

- UN. (2016). INCLUSIVE INSTITUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Sustainable Development UN. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10792Chapter4_GSDR2016.pdf
- UN. (n.d.). Global Issues | United Nations. the United Nations. Retrieved January 26, 2022, from <https://www.un.org/en/global-issues/>
- UN. (nd). What Is Climate Change. United Nation. Retrieved from: <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>
- UNESCO Scientific Advisory Board. (2016). Indigenous and local knowledge(s) and science(s) for sustainable development: policy brief by the Scientific Advisory Board of the UN Secretary-General. Retrieved from UNESCO Digital Library: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246104>
- UNFCCC. (2006). United Nations Framework Convention on Climate Change: Handbook. Bonn: Climate Change Secretariat. Retrieved January 19, 2022, from <https://unfccc.int/resource/docs/publications/handbook.pdf>
- UNFCCC. (2007). Climate Change: Impacts, Vulnerabilities, and Adaption in Developing Countries. Bonn: UNFCCC Secretariat. Retrieved January 19, 2022, from <https://unfccc.int/resource/docs/publications/impacts.pdf>
- UNFCCC. (2007). Synthesis of information and views on adaptation planning and practices submitted by Parties and relevant organizations. Bonn: UNFCCC Secretariat. Retrieved January 19, 2022, from <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2007/sbsta/eng/09.pdf>
- UNFCCC. (2018, October 22). Key aspects of the Paris Agreement. UNFCCC. Retrieved January 25, 2022, from <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement/key-aspects-of-the-paris-agreement>
- UNFCCC. (n.d.). What is transparency and reporting? UNFCCC. Retrieved January 25, 2022, from <https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/the-big-picture/what-is-transparency-and-reporting>
- United Nations. (2014). Country classification. Retrieved from un.org: https://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classification.pdf
- Viotti, P., & Kauppi, M. (2001). *International Relations Theory* (5th ed.). London: Pearson Education
- Wardhani, Baiq, L S.W. (2015). *Kajian Asia Pasifik: Politik Regionalisme dan Perlindungan Manusia di Pasifik Selatan Menghadapi Kepentingan Negara Besar dan Kejahatan Transnasional*. Iternas Publishing.